

**PENGARUH PEMBIAYAAN KOPERASI TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN
DI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (**SE**)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

Hasyuni

NIM 14.16.15.0031

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO**

2018

**PENGARUH PEMBIAYAAN KOPERASI TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN**

DI KOTA PALOPO



IAIN PALOPO

Hasyuni
NIM 14.16.15.0031

Dibimbing Oleh:
Muzayyanah Jabani, ST., M.M. (Pembimbing I)
Dr. Takdir, SH., M.H. (Pembimbing II)

Diuji Oleh:
Zainuddin S, SE., M.Ak. (Penguji I)
Hendra Safri, M.M. (Penguji II)

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Jual Beli Online Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam**” yang di tulis oleh **Indri Wahyuni Ridwan**, dengan NIM **14.16.4.0049** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari senin **14 Mei 2018** bertepatan dengan **28 Sha’ban 1439 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 14 Mei 2018 M
28 Sha’ban 1439 H

TIM PENGUJI

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA. | Penguji I (.....) |
| 4. Hendra Safri, S.E., M.M | Penguji II (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl. | Pembimbing I (.....) |
| 6. Dr.Sulaiman Jajuli, M.El. | Pembimbing II (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001

Ilham, S.Ag., M.A
NIP 197310112003121003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul ***"Pengaruh Pembiayaan Koperasi terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kota Palopo"*** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Sebagai nabi uswatun khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

Kepada orang teristimewa bagi penulis yakni Kedua orang tua penulis “Ayahanda Kaharuddin dan Ibunda Sunarsi” yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah swt. Memohon keselamatan bagi penulis dan telah membesarkan serta mendidik hingga sampai pada penulisan skripsi, memberikan motivasi sertadukungan secara materi dan non materi.

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S, M. Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Zainuddin S., S.E., M.Ak., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. dan Dr. Takdir, SH., MH, yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.

5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan Kantor kepala dinas perikanan beserta seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mengumpulkan informasi serta memberikan arahan selama penulis mengadakan penelitian hingga selesai menyusun Skripsi ini.
7. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat penulis Maccerita (Erwin Jafar, Riswan Aris, Daliati, Ichzani Fajriah, Hasrida) yang selalu ada dalam suka dan duka penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Pesantren Modern Datok Sulaiman (PMDS) terutama angkatan 2014 yang selama ini selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2014 Perbankan Syariah A yang selama ini selalu membrikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program studi Perbankan Syariah (HMPS) yang telah mendoakan sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan.

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 05 Februari 2018

Hasyuni

ABSTRAK

Nama : Hasyuni
NIM : 14.16.15.31
Judul : Pengaruh Pembiayaan Koperasi Terhadap Peningkatan
Pendapatan Nelayan di Kota Palopo

Pembiayaan koperasi memiliki peranan terhadap peningkatan pendapatan nelayan, akan tetapi permasalahan yang dihadapi yaitu pada umumnya masih banyak nelayan di Kota Palopo yang belum memanfaatkan pembiayaan koperasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan koperasi terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu aksidental sampling. Data diolah dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana menggunakan *SPSS for Windows*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan koperasi terhadap peningkatan pendapatan nelayan Kota Palopo berpengaruh positif sebesar 0,248 atau sama dengan 24,8% dan signifikan ($0,005 < 0,05$). H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya pembiayaan koperasi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

Kata Kunci : Pembiayaan Koperasi, Pendapatan Nelayan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL	xvi
ABSTRAK	xviii
PRAKATA.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4

C. Hipotesis.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Definisi Operasional Variabel.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
B. Kajian Pustaka.....	9
1. Pembiayaan	9
1.1 Pengertian	9
1.2 Jenis-jenis Pembiayaan	12
1.3 Prinsip Pembiayaan	13
1.4 Proses Pemberian Pembiayaan	15
2. Koperasi	16
2.1 Pengertian	16
2.2 Fungsi dan Peran Koperasi	17
2.3 Landasan Koperasi	17
2.4 Prinsip Dasar Koperasi.....	19
2.5 Koperasi Sebagai Sistem Sosial Ekonomi	26
2.6 Kebijakan Pengembangan Ekonomi	30
2.7 Siklus Kehidupan Koperasi (<i>Cooperative Life Cycle</i>)	35
3. Nelayan	36
3.1 Pengertian Nelayan	36
3.2 Nelayan Tradisional	36
3.3 Penggelongan Nelayan	36
3.4 Konteks Masyarakat Nelayan	39
C. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46

B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	46
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	48
1. Uji Instrumen	49
2. Uji Asumsi Klasik	51
3. Analisis Regresi Sederhana	52
4. Uji Hipotesis	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Uji Asumsi Klasik	55
2. Uji Hipotesis	56
3. Analisis Regresi Sederhana	58
B. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Kuesioner	47
Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.1 Hasil uji Normalitas Data.....	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Koefesien Determinasi R^2	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial (Uji-t)	54
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Sederhana	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses dan Hubungan yang Ada dalam Rapat Anggota	21
Gambar 2.2 Hubungan Anggota dengan Pengurus dalam Penetapan Harga Sebagai Dasar Bersaing di Pasaran	22
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang mutlak yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan saat ini yaitu disektor perikanan. mengingat Indonesia adalah negara maritim, sektor perikanan diarahkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kecil yang ekonominya lemah. Keberadaan industri perikanan ini bagi masyarakat sekitar memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja.¹ Industri perikanan

¹ Sri Widodo, “Pengaruh Pembiayaan Kredit Modal Kerja terhadap Penghasilan Petani Ikan”, 2016, h. 1

sebagai industri yang dapat memberikan kontribusi dalam memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat. Untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan modal yang memadai dari akses lembaga keuangan, salah satunya yaitu koperasi. Pembiayaan koperasi dapat membantu nelayan dalam masalah permodalan.

Meskipun pembiayaan koperasi memiliki potensi terhadap peningkatan pendapatan nelayan, akan tetapi pada umumnya masih banyak nelayan di Kota Palopo yang belum memanfaatkan pembiayaan koperasi tersebut. Hal ini disebabkan karena nelayan di Kota Palopo tidak menggunakan pembiayaan koperasi sebagaimana mestinya.

Untuk memanfaatkan sumber daya perikanan laut secara optimal dan lestari masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, terutama menyangkut permodalan yang belum kondusif bagi investasi usaha penangkapan ikan. Sistem perizinan dinilai juga kurang efisien dan cenderung mempersulit. Dalam pembangunan perikanan masa depan, orientasi kerakyatan terutama dimasa tuntutan reformasi harus menjadi tumpuan dalam mencapai target. Untuk ke arah itu, maka kegiatan perikanan rakyat seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Pemberdayaan perikanan rakyat (nelayan) melalui dukungan kelembagaan dan permodalan merupakan solusi strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Oleh karena koperasi sampai saat ini belum banyak memainkan peran, termasuk rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana-dana program pemberdayaan, maka sistem kemitraan sangat diperlukan dari berbagai pihak dengan pola saling menguntungkan.

Salah satu jenis usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kota Palopo adalah perdagangan ikan. Keberadaan nelayan ini bagi masyarakat sekitar memiliki peran besar dalam perekonomian masyarakat kota palopo. Usaha pelelangan ikan sebagai salah satu mata pencarian yang dapat memberikan kontribusi dalam memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat Kota Palopo. Karena Kota Palopo merupakan daerah yang memiliki kekayaan lautan yang melimpah sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Palopo. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).

² Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahnya . (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 106

Untuk menjaga kelangsungan peningkatan pendapatan nelayan masyarakat mayoritas mengambil pembiayaan seperti pada koperasi dan bank untuk menjaga dan meningkatkan kelangsungan usahanya. Lembaga keuangan berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini. Semakin meningkatnya kebutuhan investasi dan membutuhkan modal yang besar dapat dipenuhi dengan adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme pembiayaan dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme pembiayaan, sehingga lembaga keuangan memiliki peran yang besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat.³

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pembiayaan koperasi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo ?

C. Hipotesis

Hipotesis yang peneliti rancang berdasarkan dari tujuan penelitian, hipotesis yang di uji dalam penelitian ini adalah :

H_0 : pembiayaan koperasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo.

H_1 : pembiayaan koperasi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo.

³ Dita Andriana, “Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil”, 2016, h. 6

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah pembiayaan koperasi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu komunikasi dan menambah kajian ilmu komunikasi khususnya ilmu perikanan untuk mengetahui bagaimana strategi kreatif yang diharapkan dalam perikanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak perikanan dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

F. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pembiayaan koperasi	Pembiayaan koperasi adalah pemberian fasilitas penyediaan dana dalam menggerakkan ekonomi rakyat	1. Transparan/ Terbuka

		sesuai dengan prinsip gotong royong.	2. Mudah 3. Cepat ⁴
2	Pendapatan Nelayan	Pendapatan nelayan adalah suatu penghasilan yang diperoleh nelayan dalam melakukan usaha. Dalam penelitian ini nelayan yang dimaksud adalah nelayan yang terdata/terdaftar dalam dinas kelautan/perikanan Kota Palaopo.	1. Produksi 2. Pengelolaan 3. Pemasaran ⁵

⁴ Arif Subiyanto, "*Manajemen Koperasi*", (Yogyakarta; Gosyen publishing, 2015), h.32

⁵ <https://www.google.co.id/amp/s/yitnostar.wordpress.com/2012/11/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pendapatan-nelayan/amp/>. Diakses pada 20 Juli 2017 pukul 19.45

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian Amin Budiwan, 2013 dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terhadap industri kecil pengolahan ikan di kabupaten demak”. Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) ada pengaruh positif antara upah terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. (2) ada pengaruh yang positif antara nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. (3) modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Amin Budiwan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan data yang berupa data primer yang diambil dengan metode angket. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi pengambilan sampel dengan cara proporsional sampling yaitu pengambilan sampel dengan memberikan proporsi menurut jumlah populasi di kecamatan yang merupakan sentra industri pengolahan ikan, dan teknik analisis regresi berganda.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sri widodo dengan judul “pengaruh pemberian kredit modal kerja terhadap penghasilan petani ikan”. Berdasarkan hasil

⁶Amin Budiawan, “*Faktro-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Tenaga Kerja terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak*”, dalam jurnal *Economics Development Analysis Journal*, volume 2, nomor 1, 2013, h. 7

analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan yaitu dari hasil pengujian statistik individual (uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,447 (modal), 18,667 (kredit) < dari p value. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modal, dan kredit berpengaruh positif terhadap penghasilan petani, karena p value kredit dari modal < 5 % atau signifikan pada 5% sehingga apabila modal, dan kredit semakin baik maka penghasilan petani juga akan mengalami peningkatan.⁷

Persamaan penelitian Sri widodo dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel usaha ikan. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian Sri widodo menggunakan kredit modal kerja sedangkan penelitian ini menggunakan pembiayaan sebagai variabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Dita Andriana (2016) dengan judul “pengaruh pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kecil yang merupakan sejumlah 1.659 orang dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 36 sampel atau responden.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang diberikan oleh KJKS BMT AL-FATH memberikan dampak positif terhadap perkembangan keuntungan usaha mikro dan kecil yang terbagi menjadi kategori pedagang kaki lima, pedagang

⁷ Sri Widodo, “*Pengaruh Pemberian Modal Kerja terhadap Penghasilan Petani Ikan*”, Yogyakarta, 2004, h. 15

⁸ Dita andriana, “*Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil*”, 2016, h. 40- 41

warung/toko, dan lain-lain mengenai perkembangan keuntungan yang besar. Hal ini disebabkan oleh keuntungan sektor perdagangan yang bersifat harian (tiap hari) sehingga perputaran uangnya lebih cepat. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui pengaruh modal pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan usaha mikro dan kecil. Dapat dilihat dari hasil uji t pada modal pembiayaan yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $9,818 > 1,677$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0,000 > 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan nilai koefisien korelasi yang positif sebesar 0,599 dengan tingkat signifikansi 0,000, lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Oleh karena itu tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha=5\%$ maka pengujian hipotesis berhasil dibuktikan.⁹

Persamaan penelitian Dita Andriana dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel pembiayaan. Sedangkan perbedaan yaitu pembiayaan usaha mikro.

Penelitian yang dilakukan oleh Brefin Mushtaf Adam, Abdul Rosyid, dan Imam Triarso (2013) dengan judul "analisis kinerja koperasi unit desa makaryo mino dalam usaha pemberdayaan masyarakat nelayan di kota pekalongan". Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa KUD Makaryo Mino adalah koperasi perikanan yang memiliki usaha dibidang perikanan yaitu Produksi Es, Perdagangan, SPBB, penyewaan Fish basket. Kinerja KUD Makaryo Mino selain penyediaan kebutuhan perbekalan kapal juga penyediaan kredit pinjaman modal serta program-program

⁹ Dita andriana, "*Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro an Kecil*", 2016, h. 87

sosial yang bekerja sama dengan pemerintahan kota Pekalongan dalam program kesejahteraan nelayan. Hasil penilaian Kinerja Koperasi Unit Desa Makaryo Mino pada tahun 2011 dengan acuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 06/Per/M.KUKM/V/2006 memiliki nilai hasil capaian 81,5% dapat dinyatakan kinerjanya berhasil, dan sesuai tanggapan responden pada tahun 2010 mendapat hasil capaian 80,14 % dapat dinyatakan berhasil dan pada tahun 2011 sebesar 85,24 % dapat dinyatakan sangat berhasil.¹⁰

Persamaan penelitian Brefin Mushtaf Adam, Abdul Rosyid, dan Imam Triarso dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan pada kota pakalongan.

B. Kajian Pustaka

1. Pembiayaan

1.1 Pengertian

Menurut M. Syarif¹⁰ Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang

¹⁰Brefin Mushtaf Adam dkk, "Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Makaryo Mino dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Pekalongan", dalam *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, h. 124

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Sedangkan menurut UU NO 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut R. Latumaerissa, julus pengertian pembiayaan menurut Jhonson adalah kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan memberikan janji akan membayarkan sejumlah uang seketika diminta pembayarannya atau suatu hari tertentu dikemudian hari. Menurut Muhammad pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang *surplus* dana.

Menurut SOP KSPS BMT RAMA Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak KSPS BMT RAMA sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari

¹¹Brefin Mushtaf Adam dkk, "Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Makaryo Mino dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Pekalongan", dalam *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, h. 23

pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Adapun pembiayaan/ penyaluran dana dan pendanaan pada lembaga keuangan baik Bank, Lembaga Keuangan, Koperasi, dll dapat melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut UU NO 21 Tahun 2008: BAB 1 prinsip syariah adalah Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dari semua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit atau pembiayaan adalah diperolehnya uang atau barang dan jasa yang dapat di ukur dengan uang dengan suatu akad perjanjian pengembaliannya dapat dilakukan dikemudian hari baik langsung dilunasi atau sesuai perjanjian, dan biasanya pengembalian tersebut disertai dengan sejumlah imbalan sesuai kesepakatan.

Syariah bersifat komprehensif, yakni merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Di dalam muamalah inilah sistem perekonomian umat muslim diatur melalui sebuah lembaga keuangan. Menurut Kasmir, definisi lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua duanya, menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam Islam, sebuah lembaga keuangan harus dilaksanakan sesuai syariah yang pada prinsipnya bebas dari riba, karena riba haram hukumnya.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2) : 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Terjemahnya :

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiayanya dan tidak (pula) dianiaya.¹²

1.2 Jenis-jenis Pembiayaan

a. Jenis pembiayaan berdasarkan dari kegunaanya

1) Pembiayaan modal kerja

Menurut M. Syafi'i Antonio jenis pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam meningkatkan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif yaitu meningkatkan kualitas mutu dan hasil produksi untuk keperluan perdagangan atau meningkatkan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas- fasilitas yang erat kaitannya.

¹² Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahnya . (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 47

b. Jenis pembiayaan berdasarkan dari tujuannya

1) Pembiayaan *Produktif*

Pembiayaan *Produktif* adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2) Pembiayaan *Konsumtif*

Pembiayaan *konsumtif* merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

1.3 Prinsip Pembiayaan

Guna mempermudah dalam menganalisa pencairan pembiayaan untuk mengurangi resiko yang mungkin akan ditimbulkan di kemudian hari, maka dalam merealisasikan pembiayaan menggunakan prinsip 5C dan 7P.

1) Prinsip 5C adalah *character, capacity, capital, colateral, condition*.

a. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Pengetahuan *character* calon debitur ini dimaksudkan agar meyakinkan lembaga keuangan bank/bmt setelah mengetahui watak (perilaku baik/buruk) orang yang akan diberikan pembiayaan.

b. *Capacity*

Digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit/pembiayaan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya sehingga lembaga keuangan bank/bmt bisa menilai kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman.

c. Capital

Mengetahui sumber pendapatan yang dimiliki oleh nasabah. Karena lembaga keuangan tidak bersedia memberikan pembiayaan/kredit suatu usaha yang belum berjalan atau belum beroperasi.

d. Colateral

Merupakan jaminan yang diberikan nasabah baik berupa fisik maupun *non* fisik. Nilai suatu jaminan seharusnya melebihi jumlah kredit yang diajukan. Jaminan juga perlu diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah (*kredit macet*) barang jaminan dapat digunakan bank/BMT untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan.

e. Condition

Condition yaitu kondisi ekonomi sekarang atau dimasa yang akan datang berkaitan dengan prospek usaha dari nasabah. Berkaitan dengan hal ini bank/BMT tidak mungkin merealisasikan pembiayaan terhadap suatu usaha yang akan mengalami gulung tikar (*pailit*).

2) Prinsip 7P adalah *personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, protection*.

a. Personality

Mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghasilkan masalah.

b. *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat di golongan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c. *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan/kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk produktif atau untuk tujuan perdagangan.

d. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit diperoleh, semakin banyak sumber penghasilan.¹³

1.4 Proses pemberian pembiayaan.

¹³Ardhi Kusuma Wardana, “*Prosedur Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS)*”, 2011, h. 13-20

Pemberian fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dilakukan melalui serangkaian proses mulai dari permohonan, pengumpulan informasi, pencairan pembiayaan, hingga pelunasan kembali pembiayaan. Proses ini dilakukan secara cermat dengan tujuan agar bank mendapatkan keuntungan dengan risiko yang terukur. Proses pemberian pembiayaan secara sederhana.

Setelah ada permohonan nasabah/calon nasabah, proses pemberian pembiayaan dari awal sampai akhir yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data/informasi dan verifikasi
- 2) Analisis dan persetujuan pembiayaan
- 3) Administrasi dan pembekuan pembiayaan
- 4) Pemantuan pembiayaan
- 5) Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan¹⁴

2. Koperasi

2.1 Pengertian

Menurut UU koperasi No. 12 Tahun 1967 pasal 3 mengenai koperasi adalah badan ekonomi yang sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam UU No. 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang

¹⁴ Fatkur Rahman, "Memahami Bisnis Bank Syariah", (Jakarta; gramedia pustaka agama, 2014), h. 223

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan pasal 1 ayat 2 mengatakan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.¹⁵

Secara umum pengertian koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang, seorang yang dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2.2 Fungsi dan peran koperasi

Berdasarkan pasal 5 UU RI No 25 1992, fungsi dan peran koperasi adalah;

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁶

2.3 Landasan koperasi

¹⁵ Arif Subiyanto, "Manajemen Koperasi", (Yogyakarta; Gosyen publishing, 2015), h. 5

¹⁶ Arif Subiyanto, "Manajemen Koperasi", (Yogyakarta; Gosyen publishing, 2015), h. 7-8

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku – pelaku ekonomi lainnya. Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa landasan koperasi berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 atas asas kekeluargaan.

Koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

a) Landasan adil

Sesuai dengan Bab II UU No. 25 tahun 1992, landasan Adil Koperasi Indonesia adalah Pancasila yang dalam hal ini merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia.

b) Landasan Struktur

Sesuai dengan Bab II UU No. 25 tahun 1992, landasan struktural koperasi adalah Undang – Undang Dasar 1945. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara.

Seperti yang tercantum dalam UU No 25. Tahun 1992 pasal 2, tentang perkoperasian menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi sesuai dengan kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dengan kenyataan ini timbul kesadaran yang mengarah pada semangat kekeluargaan dalam suatu koperasi diharapkan dapat mendorong anggota koperasi untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan koperasi. Letak perbedaan koperasi dengan perusahaan lain adalah pada asas kekeluargaan ini, semangat kekeluargaan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh koperasi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan koperasi Indonesia adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 diatas, dapat dijelaskan bahwa secara garis besar tujuan dari koperasi Indonesia meliputi tiga hal, yaitu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan turut serta membangun tata perekonomian nasional.

2.4 Prinsip dasar koperasi

1) Prinsip Identitas (*principle Identity*)

Beberapa prinsip koperasi meupun definisi-definisi hukum mengenai koperasi, akan tetapi tidak dapat digunakan secara langsung sebagai kriteria yang tepat bagi definisi-definisi ilmiah mengenai organisasi koperasi yang diterapkan secara umum (Universal). Untuk itu perlu penjelasan bahwa keduanya pada umumnya digunakan terhadap struktur organisasi koperasi yang sangat khusus.

Koperasi biasanya selalu dihubungkan dengan individu/kelompok-kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan umum, sasaran-sasaran kongkrit melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang dilaksanakan bersama untuk memperoleh manfaat bersama. Hal ini terlihat secara jelas dari pandangan yang dikemukakan dalam pernyataan-pernyataan dan resolusi-resolusi internasional yang menekankan dan menyatakan adanya usaha-usaha mengembangkan koperasi dinegara-negara

berkembang antara lain: rekomendasi mengenai peran koperasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang sehingga berkaitan erat dengan definisi koperasi yang akhirnya didapat/diketahui kegunaan definisi koperasi yaitu:

- a) Untuk menghilangkan perbedaan pendapat, sekaligus untuk mencapai keseragaman pendapat.
- b) Sebagai pedoman untuk melaksanakan aktivitas koperasi.
- c) Sebagai dasar/landasan pengembangan koperasi.
- d) Untuk membedakan koperasi dengan lembaga-lembaga lain.

2) Prinsip dual identities (*dual identity principle*)

Hampir setiap pimpinan koperasi mempunyai konsep masing-masing mengenai bagaimana koperasi yang baik itu, yang didasarkan atas pengalaman pribadinya. Menurut ahli koperasi dari Jerman dan Amerika Serikat, fungsi dasar dari karakteristik koperasi dapat digambarkan melalui kriteria identitas atau prinsip identi yang merupakan identitas pribadi antara pemilik dan pembeli (penyuplai atau pekerja, tergantung dari jenis koperasinya), yang mendekatkan koperasi dengan organisasi usaha lainnya.

3) Beberapa hal yang mempengaruhi penerapan prinsip identitas pada koperasi.

Dalam penerapan prinsip identitas koperasi, permasalahan yang muncul yaitu sejauh mana identitas dapat diterapkan pada koperasi, hal ini sangat tergantung pada beberapa hal sebagai berikut;

- a) Hubungan kepentingan

Adanya hubungan diantara semua yang berkepentingan dalam organisasi (koperasi). Hal ini dapat dilihat melalui hubungan :

1. Anggota dengan pengurus
2. Anggota dengan manajer (harus terjalin hubungan yang harmonis)
3. Anggota dengan anggota (sesama anggota)

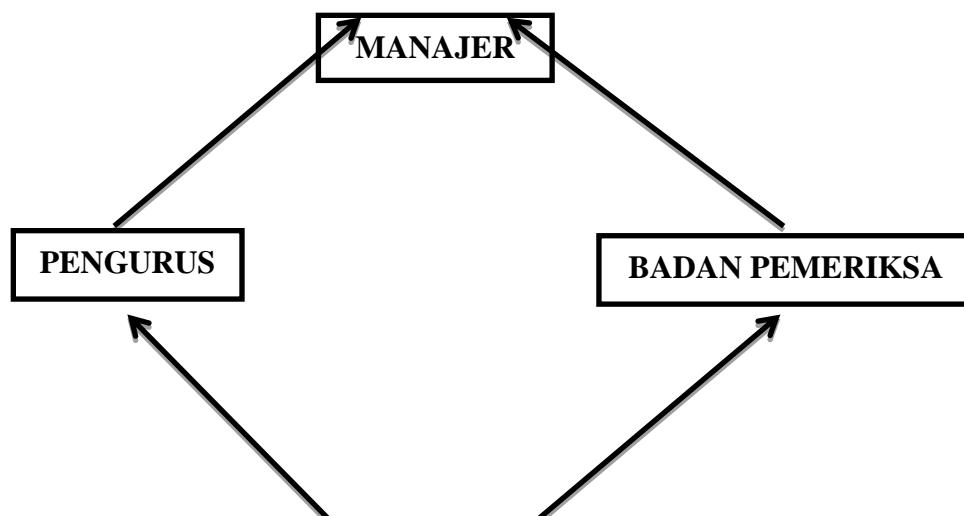
b) Partisipasi

partisipasi adalah adanya keikut sertaan dalam menentukan dan mengawasi jalannya kegiatan dan usaha koperasi.

c) Pengembalian koperasi

Hal ini diwujudkan dalam partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Ketiga hak tersebut diatas dalam perakteknya adalah dilaksanakan dengan jelas melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tugasnya antara lain adalah:

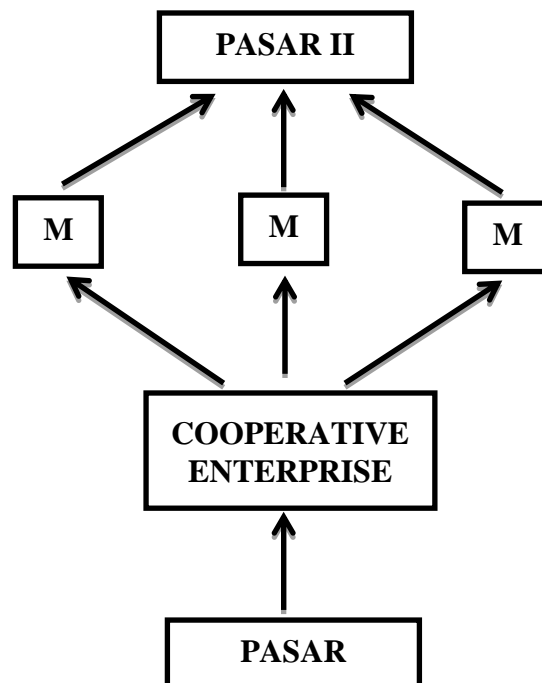
Delegation of auctority mempunyai syarat dan berarti bukan sewenang-wenang, tetapi harus memberikan laporan atau pertanggung jawaban yang dilakukan pada rapat anggota. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :



RAPAT ANGGOTA

Gambar 2.1 Proses dan Hubungan yang Ada dalam Rapat Anggota

Hubungan anggota dengan pengurus (*the output relationship between members dan manajer*) adalah pelayanan atau servis yang diberikan koperasi kepada para anggotanya, terutama unit-unit usaha. Dalam hal ini hubungan dipengaruhi sekali oleh kondisi pasar, bagaimana koperasi dapat bersaing di pasar terutama dalam hal penetapan harga. Hal ini dapat dijelaskan dalam gamar/skema seperti berikut :



Gambar 2.2 Hubungan Anggota dengan Pengurus dalam Penetapan Harga

Sebagai Dasar Bersaing di Pasaran.

Bagaimana anggota memberikan bimbingan atau pengawasan kepada manager dan pengurus (*supervision orf board of direction and manajer*)

Sebagai pemilik (*owners*), anggota berhak melakukan supervisi terhadap pengurus dan manajer serta karyawan-karyawan yang diangkat, demikian pula terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan dan kegiatan koperasi dari anggota harus mengetahui perkembangan koperasinya pada setiap saat. Hal ini muncul suatu kondisi yang disebut *conficting theory*, kondisi yang di mana antara keadaan pasar dan kepentingan anggota yang perlu dianalisis secara teori.

Agar jalannya secara koperasi dapat terkendali, maka usaha yang dilakukan melalui :

- a) *Ex-ante control*, yaitu pengawasan dilakukan sebelum suatu rencana atau dilaksanakan.
- b) *Current operational control*, yaitu pengawasan agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi segera diketahui sehingga sedini mungkin dapat dicari jalan keluarnya.
- c) *Ex-post control*, yaitu pengawasan setelah kegiatan berlangsung (evaluasi).

Berdasarkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU RI No. 25 Tahun 1992, maka kita dapat mengetahui prinsip koperasi.

1. Koperasi melaksanakan prinsip prinsip koperasi sebagai berikut;
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut;
- a. Pendidikan koperasian
 - b. Kerja sama antara koperasi.
- 4) Prinsip-prinsip *Rockdale* dan *ICA*

Rockdale adalah seorang kebangsaan inggris yang belajar dari pelayanan dimasa lampau sehingga pelayanan pahitnya ia berusaha mengembangkan koperasi yang dilakukan secara eksperimental dan setelah berdiskusi ia mendirikan suatu koperasi pada tanggal 24 oktober 1844 dan memulai usaha pertokoan sebagai usahanya sendiri secara berhasil. Peristiwa ini seringkali sebagai saat kelahiran “Gerakan Koperasi Moderen”.

Dalam sejarahnya rockdale tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk mendirikan dan menciptakan/mengelola usaha-usaha perdagangan, maka “kegiatan-kegiatan percobaan itu merupakan suatu yang baru bagi mereka”. Mereka harus banyak memikirkan dan menyusun aturan-aturannya sendiri. Sesuai dengan itu mereka merumuskan aturan-aturan yang diterapkan, kemudian menjadi prinsi-prinsip koperasi.

Pada mulanya prinsip-prinsip itu hanya semata-mata merupakan aturan-aturan perusahaan yang dirancang dan dirumuskan oleh para pekerja itu sendiri untuk menjalankan usaha pertokoannya. Aturan-aturan oleh para pelapor dari Rockdale yang mula-mula hanya sekedar sebagai petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seharusnya suatu toko koperasi konsumen yang diorganisasi dan dijalankan oleh para anggotanya sendiri atas dasar keadaan yang terdapat di Inggris pada ketika itu, akhirnya menjadi prinsip-prinsip koperasi Rockdale yang terkenal. Prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Keanggotaan yang bersifat terbuka
- b) Pengawasan yang terbatas atas modal anggota
- c) Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi (*patroge refund*)
- d) Barang-barang hanya dijual dengan harga pasar yang berlaku dan aliran politik
- e) Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa agama dan aliran politik
- f) Barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli dan tidak rusak atau palsu
- g) Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan.
- h) Netral terhadap agama dan aliran politik.

Prinsip-prinsip tersebut ternyata perkembangannya menjadi petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pembentukan koperasi-koperasi para konsumen dari para anggota yang hidup dalam keadaan yang serupa dengan keadaan para pelapor dari

Rockdale. Namun prinsip-prinsip itu harus disesuaikan, diubah atau sebagainya tidak dapat diterapkan secara langsung.

Misalnya situasi dimana:

1. Koperasi-koperasi konsumen/konsumsi harus bertahan dalam kompetisi/persaingan pasar yang terjadi dalam kehidupan ekonomi negara-negara industri yang telah maju.
2. Jenis tipe koperasi yang lain, misalnya, koperasi-koperasi kredit harus diciptakan.
3. Koperasi didirikan dalam usaha kondisi ekonomi dan sosial budaya yang sangat berbeda dengan keadaan di Inggris pada pertengahan abad ke 19.

Definisi koperasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip Rockdale adalah sebagai berikut:

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dijalankan oleh para anggotanya didasarkan pada satu orang satu hak suara dengan surplus perdagangannya dibagikan dikalangan para anggota secara/dengan bagian-bagian/ aturan yang disetujui bersama. Oleh karena itu keanggotaannya dapat dilihat sebagai perluasan dari pemegang saham koperasi, pengambilan keputusan didasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi, dan tonggak modal tidaklah perlu sebagai unsur yang penting dalam keanggotaan/keikutsertaan.¹⁷

2.5 Koperasi Sebagai Sistem Sosial Ekonomi

1) Pengakuan koperasi sebagai badan usaha kontroversial

¹⁷Arif Subiyanto, "Manajemen Koperasi", (Yogyakarta; Gosyen publishing, 2015), h.27-33

Roy dalam bukunya *Cooperative: development, principle management*, mengemukakan bahwa: terdapat perbedaan yang kontroversial antara koperasi sebagai badan usaha dan koperasi sebagai bukan badan usaha.

Pendapat 1: dikemukakan oleh Emilianoff, Robotka dan Philips, mengemukakan bahwa:

Koperasi bukan sebagai badan usaha menurut tinjauan ekonomi, karena pendapat ini tidak menentukan bentuk keuntungan (*income entrepreneur*).

Keuntungan yang diperoleh koperasi harus didistribusikan kepada para anggota sesuai dengan jasa yang diberikan kepada koperasi, jika bukan berdasar atas saham yang dimaksudkan oleh pemilik saham koperasi merupakan kerja sama (*joint venture*) dari pada anggota sebagai pemilik dan koperasi juga diawasi oleh para anggota sebagai pelanggan, sehingga konsep tersebut jelas menunjukkan bahwa koperasi secara esensial merupakan bentuk perluasan kerja sama vertical, dimana aktivitasnya merupakan bagian integral dari koperasi untuk keperluan para anggota. Emilianoff selanjutnya mengemukakan bahwa koperasi bukan merupakan suatu unit yang mengharapkan bentuk-bentuk material (macam keuntungan material) tapi lebih merupakan koordinasi dari unit ekonomi independen.

Philips mengemukakan konsep ini sebagai berikut: koperasi mempunyai ciri-ciri suatu “perluasan”, tetapi tidak memiliki ciri-ciri sebagai badan usaha (bukan merupakan bentuk perusahaan). Koperasi tidak bertujuan mengejar prestasi ekonomi yang terpisah dari anggota. Para dapat mengejar prestasi ekonomi masing-masing, tetapi mengganggu aktivitas koperasi secara bersama-sama. Jadi secara jelas dapat

dikemukakan bahwa pendapat mengemukakan bahwa ditinjau dari sisi ekonomi koperasi bukan merupakan badan usaha.

Pendapat 1 justru memungkinkan koperasi erat kaitannya dengan “kartel” dalam dunia usaha (kerja sama dari firm secara multireteral).

Pendapat 2 dikemukakan oleh Helmberger, Hoor dan Bolding, mengemukakan bahwa: “koperasi merupakan badan usaha”. Pendapat ini bergumentasi bahwa kegiatan kerja sama ini trpisah dari para pemilik, artinya secara ekonomis terlepas dari para pemilik. Koperasi dari para pengambilan keputusannya, terlepas dari anggota (pemilik). Koperasi sebenarnya bukan aktivitas kerja sama.

Pendapat 2 ini berpegangan pada suatu koperasi sebagai organisasi usaha yang murni secara esensial pengembalian keputusan secara pribadi dan unit penanggung resiko dimana kekayaan harus ditanggung anggota tertentu.

Pendapat II juga mengukakan bahwa tujuan utama dari koperasi adalah memaksimalkan manfaat bagi anggotanya, sehingga prosedur dan masalahnya mirip dengan firm, bedanya hanya pada penekannya yaitu keberadaanya dari usaha terpisah.

Jadi, jelas bahwa pendapat II (ditinjau dari sisi ekonomi) koperasi merupakan badan usaha.

- 2) Koperasi sering dianggap sebagai jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Akan tetapi dilain pihak ada juga yang berpendapat bahwa koperasi tidak merupakan suatu sistem ekonomi.

Roy mendefinisikan sistem ekonomi sebagai sekumpulan kaidah, kebiasaan, hukum dan peraturan yang memperhatikan produksi, yang perlu. Dan konsumsi atau penilaian barang-barang dan jasa. Dalam sistem ekonomi terdapat 5 ciri, yaitu :

a) *Ownership of property* (pemilikan atas harta kekayaan)

Pemilik ini dapat diwariskan kepada individu atau negara

b) *Inisiatif of enterprise*

Dalam memenuhi usahanya, harus diawali dengan keberadaan alam, tenaga kerja, dan skill.

c) *Economic incentive*

Agar supaya dicapai kapasitas penuh, maka dalam bekerja orang harus ada insentif, dapat berupa upah, promosi, bonus dan sebagainya.

d) *Price Mechanism* (mekanisme harga)

Dengan mekanisme harga, maka para konsumen dapat menentukan berapa banyak uang yang dikeluarkan.

e) *Market Competition.*

Persaingan pasar dapat mencegah terjadinya stagnasi perekonomian.

Dengan mendasarkan 5 ciri tersebut, dapat dikemukakan :

1) *Ekonomi Sosialis*

Kepemilikan terhadap barang-barang alami yang diproduksi oleh manusia atau barang-barang alami yang berskala besar berada pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam ekonomi sosialisasi, banyak industri-industri dimiliki dan dioperasikan oleh negara, sehingga prim tidak memiliki kebebasan, dalam

melaksanakan usahanya (tidak seperti sistem kapitalisme). Motif keuntungan hampir seluruhnya dihilangkan, karena prim tidak diizinkan untuk memiliki dan mengoprasikan dengan skala besar untuk kepentingan individu.

2) Ekonomi Kapitalisme (Sistem Ekonomi Besar)

Individu punya kebebasan sehingga memungkinkan prim bergerak secara luar. Peraturan-peraturan pemerintah (campur tangan pemerintah) sangat minim. Disini diizinkan pemilik secara pribadi dan penggunaan keuntungan pribadi. Pemerintahan mengakui hak-hak kekayaan pribadi, kebebasan berusaha, inisiatf-inisiatif, persaingan kemampuan wiraswasta, kebebasan politik dan ekonomi. Tujuannya adalah agar standar hidup meningkat dan kesejahteraan masyarakat naik.

3) Sistem Perekonomian Indonesia Pada Saat Ini, Saat Sebelumnya Serta Pada Masa-Masa Yang Akan Datang.

Roy dalam bukunya *“Cooperative, principles and management”* mengemukakan bahwa : sistem ekonomi didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah, kebiasaan, hukum dan peraturan memperlakukan produksi, pertukaran dan konsumsi atau pemakaian barang-barang dan jasa. Selanjutnya dikemukakan bahwa sistem ekonomi terdiri atas sekumpulan kontrol yang menentukan didalam mana berbagai sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan-keinginan.

Roy mengemukakan ada lima sistem ekonomi yang dikenal hingga saat ini, yaitu: sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi fasisme, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi campuran.¹⁸

2.6 Kebijakan Pengembangan Koperasi

1) Beberapa pendapat terhadap pengembangan

Pendapat K. Verhagen:

Perkembangan koperasi di negara-negara sedang berkembang bersifat kontradiktif atau ironis, karena adanya campur tangan pemerintah yang otoriter dan *intervensi policy* yang dibingkai oleh falsafah swadaya dan partisipatif masyarakat.

Pendapat Myrdal:

Koperasi di negara-negara sedang berkembang mengalami kondisi terburuk dibanding dengan dunia lainnya (Eropa Timur/Barat) karena mereka harus bersaing tetapi bertindak dengan aturan-aturan pemerintah dan melalui manajemen pemerintah.

Syarat-syarat untuk mengembangkan koperasi swadaya :

- a) Harus ada strategi pengembangan yang disusun pemerintah yang harus sesuai dengan strategi pengembangan yang berorientasi pada ekonomi pasar, yaitu dengan memotivasi penggunaan sumber daya secara inovatif dan produktif melalui kerja sama swadaya untuk kepentingan koperasi.

¹⁸Arif Subiyanto. "Manajemen Koperasi", (Yogyakarta; Gosyen publishing, 2015), h. 37-40

- b) Adanya desentralisasi dalam perencanaan dan kegiatan maupun dalam bantuan fungsi manajemen koperasi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah tergantung pada bentuk hubungan: *apace state sponsored cooperative* atau *state controlled cooperative*, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa koperasi tidak boleh menjadi alat atau instrumen dalam rangka mencapai tujuan pembangunan atau tujuan pemerintah.
- b. Pemerintah harus memperlakukan koperasi sebagai alat swadaya bagi para anggotanya dan menunjang kepentingan para anggotanya serta mengkontruksi ekonomi di dalam menetapkan kebijakan dengan tujuan usaha koperasi.
- c. Pengaruh koperasi yang menyangkut sistem ekonomi pasar di negara yang sedang berkembang, ada kalanya pemerintah bertindak seperti di negara yang sistem ekonominya terbuka, dimana penetapan tujuannya mengambil keputusan usaha ditentukan oleh pemerintah dengan secara resmi maupun dengan secara tidak resmi.

- 2) Usaha meningkatkan koperasi sebagai organisasi swadaya yang otonom.

Dalam hal ini pemerintah ingin meningkatkan koperasi sebagai organisasi koperasi yang otonom, maka diperlukan adanya pengertian yang jelas mengenai:

- a. Apa yang disebut dengan organisasi pembangunan pemerintah dan lembaga swadaya alat pemerintah.
- b. Apa yang dimaksud dengan organisasi swadaya koperasi sebagai alat meningkatkan kepentingan anggota, dimana perlu memiliki otonomi seperti pesaing pesaingnya baik otonomi intern maupun ekstern atau adanya otonomi

pengurus dalam menentukan tujuan mandiri dana otonomi terhadap lingkup dalam menghadapi pesaingnya.

Kebijakan program dan proyek pemerintah di dalam meningkatkan koperasi swadaya, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh koperasi itu sendiri untuk meningkatkan pengembangan koperasi melalui kebijakan langsung (*direct policy*) dibarengi dengan usaha-usaha yang mendukung atau mengembangkan saran untuk mengembangkan organisasi swadaya.

Adanya kebijakan yang tidak langsung terdiri: penyusunan perundang-undangan yang mengatur kehidupan koperasi, pengembangan pasilitas untuk memberikan informasi pendidikan dan latihan koperasi, mengembangkan kegiatan auditing koperasi dan pengembangan manajemen koperasi, memperlakukan organisasi koperasi sama dengan organisasi lainnya, peraturan pajak, adanya peraturan “Anti Trus” dengan mengembangkan lembaga swadaya.

Konsep-konsep yang membenarkan upaya pemerintah untuk membentuk organisasi swadaya koperasi :

a) Konsep klasik

Di dalam konsep klasik ini para promotor digaji oleh pemerintah (di indonesia adalah deperteman koperasi), depertemen diberi tugas untuk meningkatkan motivasi, memprakarsai dan dengan dibantu oleh koperasi-koperasi sekunder, maka diperoleh suatu proses pengembangan koperasi dari bawah yang selanjutnya ke organisasi koperasi swadaya.

Hambatan-hambatan yang dialami sesuai dengan konsepsi klasik

- 1) Hambatan adanya perkembangan struktural di dalam struktur sosial, politik, ekonomi. Sedangkan sebagian besar masyarakat adalah petani kecil/kehidupannya masih terbelakang sehingga kesempatan untuk berpartisipasi sedikit sekali.
- 2) Terbentuknya pra koperasi yang ternyata merupakan pemborosan (manajemen kacau, penggunaan sumber daya yang berlebihan) sehingga pemerintah merasa wajib untuk mengawasi secara intensif.

b) Konsep *Sponsor Cooperative*

Merupakan konsep ini bahwa koperasi itu merupakan organisasi yang tepat untuk membangun masyarakat pedesaan, tetapi ternyata tidak cukup adanya koperasi yang aktif, karena para calon anggota tidak mampu memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota yang aktif. Sehubungan dengan itu maka pemerintah harus membantu dalam hal: manajemen, teknik dan pormodalan untuk koperasi agar koperasi dapat aktif dan berswadaya.

Konsep ini membenarkan upaya upaya pemerintah dengan alasan :

- 1) Adanya motivasi, pendidikan dan keuangan yang cukup dari pemerintah untuk mengembangkan koperasi.
- 2) Akan timbul kelompok-kelompok koperasi, usaha koperasi, dan organisasi koperasi sebagai akibat yang pertama.
- 3) Pemerintah dapat meningkatkan/ memungkinkan mementuk lingkungan ekonomi, sosial, politik yang mendukung koperasi.

Kegagalan-kegagalan yang fundamental (mendasar) yang dihadapi didalam pengembangan koperasi swadaya terjadi karena:

- a. Sering menyimpan dari koperasi mendasar.
- b. Adanya pendekatan-pendekatan yang paternalistik (*Top Down*) baik yang dilakukan pemerintah maupun yang diinginkan oleh masyarakat koperasi.
- c. Kepentingan birokrasi koperasi antara lain:

Adanya bantuan keuangan yang berlebihan tanpa diadakan pembedaan kondisi koperasi, adanya paksaan menjadi anggota koperasi, meskipun tidak ada pemaksaan untuk mendidik.

- d. Metode atau cara-cara pengembangan koperasi oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan administrasi pemerintah sehingga kurang memperhatikan kepentingan khusus anggota, atau kurang memperhatikan anggota yang miskin.¹⁹

2.7 Siklus Kehidupan Koperasi (*Cooperaive Life Cyscle*)

Selayaknya siklus manusia hidup bahwa dalam organisasi badan usaha koperasi juga mengalami siklus hidup, tetapi ada perbedaannya yaitu jika manusia siklusnya diakhir dengan kematian secara duniawi, sedangkan siklus organisasi BU koperasi diharapkan lahir, tumbuh berkembang, dewasa untuk selama-lamanya.

Pengelolaan organisasi BU koperasi yang baik dan tepat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen riil maupun konsumen potensial ini maka BU koperasi pasti dapat hidup berkembang selamanya dengan

¹⁹Arif Subiyanto. "Manajemen Koperasi", (Yogyakarta; Gosyen publishing, 2015), h.147-151

menyelesaikan kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tentu saja diperlukan analisis dan prediksi yang tepat dalam menjalankan usahanya pada setiap tahap-tahap kehidupan, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis pada umumnya dimana BU koperasi sebagai bagian dari masyarakat yang pluralistic.

Untuk lebih jelasnya bahwa dalam kehidupan dunia bisnis pasti terdapat hambatan-hambatan maupun faktor pendukung tinggal bagaimana manajemen dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan dapat memanfaatkan faktor pendukung yang ada. Terutama dalam menghadapi persaingan bisnis dengan memperhatikan lingkungan eksternal, demikian juga dalam memahami internal koperasi yang harus menjalankan manajemen badan usaha (sebagai kumpulan modal yang harus dikembangkan) dan manajemen keanggotaan koperasi sebagai kumpulan manusia yang serba unik sifat kepribadiannya sehingga riskan terjadinya konflik-konflik internal. Dan dari sisi lain koperasi harus menjalankan prinsip dasar yang pertama yaitu “keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela” (UU no 25 th 1952 tentang perkoperasian), dengan tujuan akhir organisasi BU koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.²⁰

3. Nelayan

3.1 Pengertian Nelayan

Menurut Imron nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah

²⁰ Arif Subiyanto, “Manajemen Koperasi”, (Yogyakarta; Gosyen publishing, 2015), h. 131-132

lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Sedangkan menurut Ensiklopedi Indonesia yang dikatakan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian.²¹

3.2 Nelayan Tradisional

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan mengertikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam Undang-Undang Perikanan tersebut khususnya butir 11 tidak menggunakan istilah nelayan tradisional melainkan istilah nelayan kecil yang berarti bahwa orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Nelayan dikategorikan sebagai seorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana mulai dari pancing, jalan dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jukung yang dilengkapi dengan metode alat tangkap ikan dan taktik penangkapan tertentu.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan baik dilaut, selat, teluk atau danau maupun sungai dengan menggunakan perahu atau kapal dan

²¹ Ari Wahyu Prasetyawan, *"Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produksi Nelayan di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang"*. Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), h. 15-17

dengan berburu atau menggunakan perangkap. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Sesungguhnya bukanlah suatu tinggal yang melainkan mereka terdiri dari beberapa kelompok.

Kriteria nelayan tradisional, yaitu:

- a) Nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah turun-temurun menangkap ikan di perairan tertentu.
- b) Menggunakan alat yang bersifat selektif dan tidak terlarang serta ditentukan areanya.
- c) Harus dilakukan oleh perseorangan dan bukan berbentuk perusahaan.²²

3.3 Penggelongan Nelayan

Menurut (Tarigan 2000 dalam Arifin, 2010), berdasarkan pendapatnya, nelayan dapat dibagi menjadi:

- 1) Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatan seluruhnya berasal dari perikanan.
- 2) Nelayan sambil utama, yakni nelayan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari perikanan.

²² Farida Tuharea, SH.,MH. “*Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik Kapal dengan Nelayan Kecil Di Kabupaten Nabire*”. Jurnal : “Legal Pluralism”, Vol. 5 No. 2, (2015), h. 279-280

- 3) Nelayan sambilan tambahan, yakni nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan.
- 4) Nelayan musiman, yakni orang yang dalam musim-musim tertentu saja aktif sebagai nelayan.

Sesungguhnya, nelayan bukanlah entitas tunggal, mereka terdiri dari berbagai kelompok. Menurut Mulyadi dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok;

- 1) Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- 2) Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.
- 3) Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Perikanan tangkapan pada umumnya terdiri atas dua macam berdasarkan pada skala usaha, yaitu:

a) Perikanan skala besar

Usaha perikanan yang diorganisasikan dengan cara yang serupa dengan perusahaan agroindustri yang secara relatif lebih padat modal, dan memberikan pendapatan yang tinggi daripada perikanan yang sederhana, baik untuk pemilik perahu maupun awak perahu, kebanyakan menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang memasuki pasaran ekspor.

b) Perikanan skala kecil

Usaha perikanan yang umumnya terletak di daerah pedesaan dan pesisir, dekat danau di pinggir laut dan muara, tampak khas karena bertumpang tindih dengan

kegiatan lain seperti pertanian, peternakan dan budi daya ikan, biasanya sangat padat karya dan sedikit mungkin menggunakan tenaga mesin, mereka tetap menggunakan teknologi primitif untuk penanganan dan pengolahan (beberapa di antaranya menggunakan es atau fasilitas kamar pendingin) dengan akibat bahwa kerugian panen sungguh berarti, mereka menghasilkan ikan yang dapat diawetkan dan ikan untuk konsumsi langsung manusia.²³

3.4 Konteks Masyarakat Nelayan

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor budaya ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.

Menurut Kusnadi (2003) ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab

²³ Ari Wahyu Prasetyawan. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produksi Nelayan di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*. Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), h. 15-17

tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskina yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah :

- 1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan,
- 2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan,
- 3) hubungan kerja (pemilik perahunelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh,
- 4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan,
- 5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan
- 6) gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah :

- 1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial,
- 2) sistim pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara,
- 3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengrusakan terumbu karang, dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir,
- 4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan,
- 5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan,
- 6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen,

- 7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan,
- 8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan
- 9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Selanjutnya Mulyadi (2007) mengatakan bahwa sesungguhnya, ada dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya dihadapan para juragan yang telah mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil.

Menurut Siswanto keterbatasan kepemilikan aset adalah ciri umum masyarakat nelayan yang miskin, hal ini tergambar dari kondisi rumah. Rumah nelayan terletak di pantai, di pinggir jalan kampung umumnya merupakan bangunan non permanen atau semi permanen, berdinding bambu, berlantai tanah, ventilasi rumah kurang baik sehingga sehari-hari bau anyir ikan menyengat dan meskipun

siang hari, di dalam rumah cukup gelap, sementara juru mudi atau juragan jauh lebih baik berbentuk parmenen.

Menurut Kusnadi sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagian masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan lautan.

Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat.
2. keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha.
3. kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada.
4. kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
5. degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil.

6. belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Masalah-masalah di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Misalnya, masalah kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh hubunganhubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumber daya lingkungan. Karena itu persoalan penyelesaian kemiskinan dalam masyarakat pesisir harus bersifat integralistik. Kalaupun harus memilih salah satu faktor sebagai basis penyelesaian persoalan kemiskinan, pilihan ini benar-benar menjangkau faktor-faktor yang lain atau menjadi motor untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Pilihan demikian memang sulit dilakukan, tetapi harus ditempuh untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia yang memang terbatas.²⁴

C. Kerangka Pikir

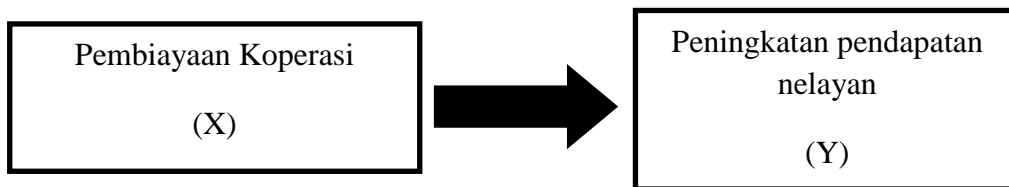
Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan di teliti.²⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan pembiayaan koperasi terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo. Dari

²⁴ Michel Sipahelut. "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara", Tesis, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2010). h. 7-8

²⁵ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 91.

hasil penelitian tersebut dapat dilihat besarnya keuntungan yang diterima nelayan setelah memperoleh pembiayaan pada koperasi.



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, penelitian menggunakan instrumen, analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian.²⁶ Penulis menggunakan penelitian kuantitatif untuk memecahkan rumusan masalah

²⁶Sugiyono, “*Metode Penelitian Manajemen*”, (Alfabeta : Bandung, 2013), h. 35-36

pembiayaan koperasi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Sedangkan kelompok populasi (*population frame*) merupakan kumpulan semua elemen dalam populasi dimana sampel diambil.²⁷ Dalam penelitian ini, menggunakan populasi yang datanya tak dapat ditentukan batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dengan bentuk jumlah secara kuantitatif. Populasi yang akan digunakan adalah para nelayan yang mengambil pembiayaan pada kopeasi di Kota Palopo.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa

²⁷Uma Sekaran, “*Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*”, (Buku 2 Edisi 4; Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 121-122

yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.²⁸

Jenis penelitian ini termasuk dalam *Non Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *aksidental sampling (Insidental)*. *Aksidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan (*Insidental*) bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.²⁹

Roscoe memberikan saran mengenai ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.³⁰ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 responden untuk dibagikan kuesioner. Karena keterbatasan data mengenai jumlah populasi yang akan diteliti sehingga peneliti mengambil jumlah minimal dari suatu ukuran sampel yang layak dalam penelitian.

D. Sumber Data

²⁸Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif dan R & D*". (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 81

²⁹Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif dan R & D*". (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 84-85

³⁰Sugiyono, "*Metode Penelitian Manajemen*". (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 164

Untuk penelitian ini, sumber data yang digunakan hanya data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang dalam hal ini adalah para nelayan yang mengambil pembiayaan di koperasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner. kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dimana responden mengisi pertanyaan/penyataan yang telah disiapkan kemudian mengembalikannya ke peneliti.³¹ Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 4 (4 berarti selalu dan 1 berarti tidak pernah).

F. Teknik pengolahan dan analisis data

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program *SPSS for Windows versi 20*. Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model penelitian yang akan digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data penelitian tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah model tersebut dapat dianggap relevan atau tidak. Semua data diolah dan dianalisis dengan menggunakan regresi linear sederhana.

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

³¹Rusady Ruslan, “*Metode Penelitian Public Relatoin dan Komunikasi*” Cet. 3: Edisi 1; (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.230

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item-total correlations). Jika r hitung $>$ r table, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Salah satu uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk yaitu validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut Jack R. Fraenkel, validasi konstruk (penentuan validitas konstruk) merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur, termasuk validasi isi dan kriteria. Suatu instrument penelitian dikatakan valid bila koefisien korelasi *product moment* melebihi 0.3.³²

³² Syofian Siregar, “Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif” Cet.2; edisi 1; (Jakarta; Bumi Aksara, 2014), h.77

Tabel 3.1**Hasil Uji Validitas Kuesioner**

Adapun hasil uji validitas kuesioner penelitian sebagai berikut:

No	Butir Soal	Hasil Uji	Keterangan
1	Soal 1	,412	<i>Valid</i>
2	Soal 2	,387	<i>Valid</i>
3	Soal 3	,590	<i>Valid</i>
4	Soal 4	,316	<i>Valid</i>
5	Soal 5	,367	<i>Valid</i>
6	Soal 6	,448	<i>Valid</i>
7	Soal 7	,549	<i>Valid</i>
8	Soal 8	,663	<i>Valid</i>
9	Soal 9	,476	<i>Valid</i>
10	Soal 10	,541	<i>Valid</i>
11	Soal 11	,423	<i>Valid</i>
12	Soal 12	,525	<i>Valid</i>
13	Soal 13	,572	<i>Valid</i>
14	Soal 14	,637	<i>Valid</i>
15	Soal 15	,621	<i>Valid</i>
16	Soal 16	,762	<i>Valid</i>

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji

statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabilitas jika memberikan nilai $\alpha > 0,6$.³³

Adapun hasil uji reliabilitas penelitiannya ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,704	17

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis regresi linier harus memperhatikan asumsi-asumsi yang mendasari model regresi. Terdapat asumsi penting mendasari model regresi linier klasik yaitu variabel-variabel tersebut berdistribusi normal, tidak terjadi *heterokedastisitas* dan *multikolonieritas* diantara variabel bebas dalam regresi tersebut. Maka tahap selanjutnya dilakukan uji statistik yaitu uji t dan regresi sederhana.³⁴

a. Uji Normalitas Data

Uji signifikansi pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*) melalui uji parsial (*uji t*) hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas bertujuan untuk

³³Syofian Siregar, "Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif" (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.87

³⁴ Zulfikar, "Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika", (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 222.

mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Terdapat beberapa metode uji normalitas.³⁵

b. Uji Heterokedastisitas

Uji *heterokedastisitas* bertujuan menguji apakah dalam sebuah kategori mempunyai varians yang sama diantara anggota tersebut. Jika varians sama, dan ini seharusnya terjadi, maka dikatakan *Homokedastisitas*. Sedangkan jika varians tidak sama, dikatakan terjadi *Heterokedastisitas*. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi gejala *heterokedastisitas* salah satunya yaitu jika tingkat signifikansi pada uji *coefficients* lebih besar dari 0,05.³⁶ Dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser.

c. Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Beberapa penyebab *autokorelasi* salah satunya adalah data bersifat *time series*, yaitu data berupa runtun waktu dimana nilai pada masa sekarang dipengaruhi oleh nilai masa lalu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari *autokorelasi*. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi gejala *autokorelasi* yaitu uji *durbin Watson (DW test)*, uji

³⁵ Zulfikar, “*Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 163

³⁶ Zulfikar, “*Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*”, h. 182.

*Langrage Multiplier (LM test), uji statistik dan Runs Test.*³⁷ Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson.

3. Analisis Regresi Sederhana

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui hasil analisis data tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = Peningkatan pendapatan nelayan

X = pembiayaan koperasi

a = konstanta harga jika X = 0

b = koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan).

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Individual (Uji *t*-Statistik)

Uji *t* digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya dalam model regresi.

- 1) Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

³⁷Irwan Gani dan Siti Amalia, *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h.124.

- 2) Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

Pengujian ini dilakukan pada taraf signifikansi tertentu adalah 5% yang artinya tingkat kesalahan suatu variabel adalah 5% atau 0,05 sedangkan tingkat keyakinannya adalah 95% atau 0,95. Jadi apabila tingkat kesalahan suatu variabel $> 5\%$ atau 0,05 berarti variabel tersebut tidak signifikan dan begitu sebaliknya. Apabila tingkat kesalahan suatu variabel $< 5\%$ atau 0,05 berarti variabel tersebut signifikan.

b. Koefisien *Determinasi R (Goodness of Fit)*

Koefisien *Determinasi* adalah kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, semakin angka mendekati satu maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, sebaliknya semakin angka mendekati nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. Koefisien determinasi, merupakan koefisien determinasi merupakan konsep statistik, sehingga sebuah garis regresi baik jika nilai R tinggi.³⁸

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

³⁸Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*”, *op.cit.*, h. 168.

Pengaruh Pembiayaan Koperasi Terhadap peningkatan pendapatan nelayan di

Kota Palopo ?

a) *Uji Normalitas Data*

Tabel 4.1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N	Mean	30
	Std. Deviation	,0000000
	Absolute	3,95602716
	Positive	,185
	Negative	,125
		-,185
Kolmogorov-Smirnov Z		1,016
Asymp. Sig. (2-tailed)		,254

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Dari tabel *one Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai signifikan sebesar 0,254. Jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05, ternyata nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas ($0,254 > 0,05$). maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b) *Uji Heterokedastisitas*

Tabel 4.2

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1 (Constant)	7,068	2,520		2,805	,009
Pembiayaan Koperasi	-,252	,141	-,319	-1,782	,0086

a Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tampilan *output* diperoleh nilai signifikansi variabel pembiayaan koperasi (X) sebesar 0,0086, artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel Pembiayaan koperasi.

c) *Uji Autokorelasi*

Tabel 4.3
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000(a)	1,000	1,000	,000	1,704

a Predictors: (Constant), Unstandardized Residual, Pembiayaan Koperasi

b Dependent Variable: Pendapatan Nelayan

Berdasarkan tampilan “*Model Summary*” diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,704. Jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 1,579 ternyata nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas ($1,704 > 1,579$). maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

Pengaruh Pembiayaan Koperasi Terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo ?

a) Koefesien Determinasi R^2

Tabel 4.4
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,498(a)	,248	,221	4,026

a Predictors: (Constant), Pembiayaan Koperasi

Berdasarkan tampilan output *summary* diperoleh *R square* sebesar 0.248. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh pembiayaan koperasi terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo sebesar 0.248 atau sama dengan 24.8% dan persentase pengaruhnya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar (100%-24,8% = 75,2%).

b) Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 4.5
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	10,689	3,656		2,923	,007
	Pembiayaan Koperasi	,623	,205	,498	3,037	,005

a Dependent Variable: Pendapatan Nelayan

Berdasarkan tampilan output hasil uji t pada tabel diatas didapatkan nilai T_{tabel} sebesar 1,701 dan T_{hitung} 3,037 atau $3,037 > 1,701$ dengan nilai probabilitas signifikan

sebesar $0.005 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa model ini signifikan sehingga dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

3. Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4.6
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1 (Constant)	10,689	3,656		2,923	,007
Pembiayaan Koperasi	,623	,205	,498	3,037	,005

4. a Dependent Variable: Pendapatan Nelayan

persamaan Regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 10,689 + 0,623X$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar positif 10,069; artinya jika pembiayaan koperasi (X) nilainya 0, maka pendapatan nelayan (Y) nilainya positif yaitu sebesar 10,069
- Koefisien regresi variabel pembiayaan koperasi (X) sebesar positif 0,623; jika pembiayaan koperasi (X) mengalami kenaikan nilai 1, maka pendapatan nelayan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,623. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pembiayaan koperasi dengan pendapatan nelayan,

semakin naik pembiayaan koperasi maka semakin meningkatkan pendapatan nelayan.

B. Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan Koperasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa pembiayaan koperasi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo. Dengan tingkat pengaruh sebesar 24,8% sedangkan 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Karena nilai *R Square* (R^2) adalah 0,248 cenderung mendekati nilai 0 maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas.

Hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pembiayaan koperasi terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kota Palopo. Hal ini berdasarkan skor signifikansi sebesar $0.005 < 0.05$.

Adanya pengaruh pembiayaan koperasi terhadap peningkatan pendapatan nelayan pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Anggraeni yang mengatakan bahwa Peranan Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP) Baruna untuk penyediaan jasa dalam kredit modal usaha terhadap nelayan termasuk katagori sangat tinggi, sedangkan penyediaan

Barang dalam penyediaan alat-alat tangkap memiliki kategori Tinggi. Tingkat kesejahteraan nelayan di kawasan minapolitan sudah termasuk katagori tinggi.³⁹

Dari hasil penelitian tersebut menggambarkan peranan koperasi terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Pesisir Baruna relatif tinggi. Koperasi memiliki peranan signifikan dalam membantu para nelayan dan pengusaha ikan untuk pengembangan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan nelayan dan pengusaha ikan akan keberadaan koperasi lembaga ekonomi yang memberikan kemudahan bagi para nelayan dan pengusaha ikan.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Keberadaan koperasi memiliki peranan penting bagi para pengusaha ikan. Koperasi dapat digunakan para nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan lebih maju dengan cara mengambil pembiayaan koperasi sehingga dengan demikian pada umumnya koperasi memiliki peranan sebagai penyedia modal, penyedia peralatan nelayan dan sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari.

³⁹Ketut Anggraeni, "*Peranan Koperasi Baruna Sebagai Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Kawasan Minapolitan*", dalam Jurnal Manajemen Agribisnis Vol 3 No. 1 Tahun 2015, h. 20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan koperasi berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan Kota Palopo sebesar 0,248 atau sama dengan 24,8% dan nilai signifikan ($0,005 < 0,05$).

B. Saran

Sebaiknya pihak koperasi melakukan sosialisasi di kalangan nelayan terkait pembiayaan koperasi karena koperasi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya. Departemen Agama RI. Bandung; Diponegoro, 2010
- Anggraini, Dewi, Syahrir Hakim Nasution. 2013. *Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi perkembangan UMKM di kota medan (studi kasus bank BRI)*. Jurnal ekonomi dan keuangan vol. 1, No. 3.
- Anggraeni, Ketut. 2015. *Peranan Koperasi Baruna Sebagai Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Kawasan Minapolitan*. Dalam Jurnal Manajemen Agribisnis Vol 3 No. 1
- Andriana, Dita. 2016. *Pengaruh pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Adam, Mushtaf, Brefin, dkk. 2013. *Analisis kinerja koperasi unit desa makaryo mino dalam usaha pemberdayaan masyarakat nelayan di kota pekalongan*. Dalam Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology Volume 2, Nomor 1.
- Astoni, Budi. *Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke Jakarta-Utara*. Dalam Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amalia, Irwan, Gani dan Siti. 2015. *Alat analisis data aplikasi statistik untuk penelitian bidang ekonomi & sosial* (Yogyakarta: CV. Andi Offset)
- Budiawan, Amin,. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terhadap industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak*. Jurusan

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang Indonesia.

Haryanto, Slamet. 2014. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Dalam jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO Vol. 2.No.1

Kurniawan ,Sofyan Yamin dan Heri. 2011. *spss complete*, (Cet. III; Jakarta: Salemba Infotek)

Pratomo, Ghozali Mohammad Rizky Teguh, “*Analisis Pengaruh Kompetensi Wirausaha dan Kemampuan Mengindra Pasar Terhadap Keunggulan untuk Meningkatkan*

Rahman, Fatkur. 2014. *Memahami bisnis bank Syariah*. (Jakarta: PT gramedia pustaka agama).

Ruslan, Rusady.2006. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*(Cet.3; edisi 1; Jakarta: PT Raja Grafindo)

Sekaran, Uma. 2015. *Research methods for business (metodologi penelitian untuk bisnis)*. Salemba empat. Edisi ke empat jakarta.

Subiyanto, Arif. 2015. *manajemen koperasi*. (yogyakarta; gosyen publishing).

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian pendidikan*. cet. XV; Bandung: Alfabeta.

Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif* (Jakarta :PT Bumi Aksara)

Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif* (Jakarta :PT Bumi Aksara)

- Valeriani, Devi. 2015. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Berbasis Maritim di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam Proceeding Sriwijaya Economic and Business Conference.
- Widodo, Sri. 2016. *Pengaruh pemberian kredit modal kredit terhadap penghasilan petani ikan*. Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yohyakarta.
- Wardana, Ardhi Kusuma. 2011. *Prosedur pembiayaan Ba'i Bitsaman ajil (BBA) pada koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) BTM rama salatiga*. Jurusan Syariah Perogram Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Selatiga.
- Wahyuning, Titi. 2013. *Beberapa faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) di KPRS "BINA KARYA" Balongpanggang-gresik*. Fakultas ekonomi, Unesa, Kampus ketintangan surabaya.
- Yusuf, Djumran. 2014. *Peranan Koperasi Sebagai Penyedia Kebutuhan Nelayan di Kabupaten Barru*. Dalam Jurnal IPTEKS PSP Vol 1.
- Zulfikar. 2016. *Pengantar pasar modal dengan pendekatan statistika*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Sarwono Jonathan dan hendra nur salim. 2017. *Prosedur-prosedur popular statistic untuk analisis data riset skripsi*. (Yogyakarta : gava media).